

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan Islam dan Negara dalam konteks Dunia Islam hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para pakar Muslim. Hal ini dikarenakan oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai Agama (Din) dengan Negara (Daulah). Perdebatan Islam dengan Negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah kehidupan yang menyeluruh yang mengatur semua kehidupan manusia termasuk kehidupan dalam berpolitik<sup>1</sup>.

Kesulitan besar dalam mencari kaitan antara Islam dan Negara terdapat pada sifat Islam yang seolah-olah Suprarasional. Sebagaimana semua Agama, Islam menjangkau kemanusiaan secara menyeluruh, tidak peduli etnis. Asumsi ini kemudian melahirkan semacam kewajiban bagi pemeluk agama Islam untuk mendirikan Negara Islam. Ironisnya Negara Islam diteroriskan sebagai Negara Tuhan atau Kerajaan Tuhan di bumi yang komponennya adalah Ummat Islam, Hukum Islam, dan Khalifah sebagai bayangan Tuhan dimuka bumi, dimana seperti yang dirumuskan oleh Syayid Quthb, Al-Maududi dan Hasan Al-Banna hampir tidak ada dukungan rakyat untuk menentukan preferensi politik secara bebas atau menegakkan kedaulatan mereka<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> A. Ubaedillah. A. *Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE. 2000). Hal 11.

<sup>2</sup> Umarudin Masdar *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais tentang Demokrasi* Yogyakarta Pustaka Pelajar 1999 Hal 131

Praktek Demokrasi akhir-akhir ini memang sering menjadi pokok pembicaraan yang hangat disetiap Negara. Sebagai sebuah proses, demokrasi diharapkan menghasilkan tujuan yang semaksimal mungkin sehingga dapat disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Sistem Demokrasi sudah diakui secara global sebagai cara yang memiliki resiko paling kecil dalam upaya mencapai tujuan bersama dan memenuhi semua keinginan masyarakat. Akan tetapi demokrasi adalah cara yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam prosesnya. Dengan kata lain, demokrasi merupakan cara terdekat dengan fitrah manusia yang bisa mentoleransi semua keadaan, tetapi cara paling sulit dilakukan untuk mencapai tujuan<sup>3</sup>.

Demokrasi secara universal adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia. Sejarah dan dinamika kehidupan manusia sejak dulu hingga sekarang meneguhkan keunggulan demokrasi dibanding dengan sistem-sistem politik yang lain termasuk Theokrasi<sup>4</sup>.

Iran (Persia) dalam bahasa Persia adalah sebuah Negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski Negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di dunia barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlevi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh

---

<sup>3</sup> Syaiful Arif, *Demokrasi sejarah praktek dan dinamika pemikirani*. Malang, program penguatan simpul demokrasi kabupaten malang, 2006, hal 5.

<sup>4</sup> Seymour Martin Lipset, *Political Man Basis social tentang politik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hal 5.

digunakan. Nama Iran adalah sebuah kognat perkataan “Arya” yang berarti “Tanah bangsa Arya”

Bangsa Iran berasal dari Ras Arya yang merupakan salah satu ras Indo-European. Migrasi bangsa Arya ke berbagai belahan bumi seperti ke Asia kecil dan India dimulai pada 2.500 Sebelum Masehi (SM). Peradaban di dataran tinggi Iran dimulai 600 tahun SM di mana saat itu terdapat 2 kerajaan yakni Parsa di sebelah Selatan dan Medes di Timur Laut Iran.

Pada akhir dekade 70-an dunia dikejutkan dengan peristiwa Revolusi Islam yang terjadi di Iran. Yang tokohnya adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini dan merupakan Pemimpin Agung Iran pertama dan merupakan pemimpin Spiritual yang pertama. Dalam revolusi 1979 tiga juta orang turun kejalan dalam mobilisasi masa terbesar sepanjang sejarah Iran. Dihadapkan dengan sebuah gerakan massa dengan skala sebesar itu, Pahlevi beserta kaki tangannya yang terlihat seperti rezim yang maha kuat, kolaps seperti satu pak kartu yang berceceran<sup>5</sup>.

Revolusi Islam Iran adalah merupakan revolusi yang merubah Iran dari Monarki dibawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Walaupun beberapa orang berpendapat bahwa revolusi masih berlangsung, rentang-waktu Revolusi ini memiliki keunikan tersendiri karena mengejutkan seluruh dunia. Tidak seperti berbagai revolusi di dunia, Revolusi Iran tidak disebabkan oleh kekalahan dalam perang, krisis moneter, pemberontakan

---

<sup>5</sup> Zayar *Revolusi Iran sejarah dan Hari Depan*nya Yogyakarta : penerbit Sumbu 2002 Hal 63

petani, atau ketidakpuasan militer; menghasilkan perubahan yang sangat besar dengan kecepatan tinggi ; mengalahkan sebuah rejim, walaupun rejim tersebut dilindungi oleh angkatan bersenjata yang dibiayai besar-besaran dan pasukan keamanan; dan mengganti monarki kuno dengan ajaran Theokrasi yang didasarkan atas *Wilayat Al-Faqih*. Hasilnya adalah sebuah Republik Islam "yang dibimbing oleh ulama. Ini merupakan peristiwa yang paling demokratis sepanjang sejarah, hal itu dikarenakan adanya perubahan rezim terjadi tanpa dibarengi adanya pertumpahan darah<sup>6</sup>, yang sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Mullah-mullah namun usaha tersebut selalu gagal.

Iran mungkin bukan merupakan sebuah negara demokrasi liberal tetapi negara tersebut sudah pasti jauh berbeda dari Republik-Republik Demokratis yang mengotori dunia sebelum tahun 1989. Iran merupakan salah satu negara yang "tunduk" kepada pemimpin spiritual.

Demokrasi secara universal adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia. Sejarah dan dinamika kehidupan manusia sejak dulu hingga sekarang meneguhkan keunggulan demokrasi dibanding dengan sistem-sistem politik yang lain termasuk Theokrasi<sup>7</sup>.

Secara umum, perkembangan Syiah di Timur Tengah telah merambah ke segala arah. Walau pun beberapa negara masih sangat ketat, seperti Arab Saudi dan

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Wahid *Tuhan Tidak Perlu di Bela* Yogyakarta : LKiS 1999 Hal 241

<sup>7</sup> Seymour Martin Lipset, *Political Man Basis social tentang politik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hal 5.

Mesir, namun gerakan-gerakan ini sudah menimbulkan riak-riak dengan para pemuda sebagai pembawanya. Tiadanya figur sentral dalam dunia Islam jelas dimanfaatkan oleh Iran untuk naik ke permukaan. Sampai pada akhirnya Negara Iran saat ini yang dikenal dengan Negara yang Mayoritas penduduknya Berfaham Syiah.

Seperti dari akar katanya, syiah mengandung Arti pengikut, dalam hal ini adalah pengikut keturunan Ali (Ahlul Bait) begitu juga Dalam hal kepemimpinan Faham Syiah yang tidak terlepas dengan hal tersebut. Menurut kalangan Syiah yang berhak menjadi pengganti Nabi Muhammad setelah beliau wafat adalah Ali bin Abi halib dan para keturunannya. Karena bagi mereka keturunan Ahlul Bait tersebut dianggap sebagai orang yang bebas dari salah dan dosa (Ma`sum), sehingga dalam zaman sekarang kepemimpinan seperti hal tersebut dikenal dengan konsep Theokrasi, karena tidak adanya partisipasi dari masyarakat.

Sebagaimana menurut Ibnu Taymiyah, Hasan Al-banna, Sayyid Qutb dan Ahmad bin Hanbal Theokrasi<sup>8</sup> adalah pemerintahan yang para pemimpinnya berdiri atas motivasi agama atau pemerintahan yang didalamnya menegakkan hukum-hukum Allah dan menegakkan syariat sebagai Undang-undang kenegaraan. Dan juga bisa diartikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan pada kekuasaan tuhan.

Sejak 1980-1984, Republik Islam Iran sebagaimana dikatakan oleh sang *Founding Father* Imam Khomeini, memang berupaya menerapkan sistem politik demokrasi yang tidak mau melepaskan nilai-nilai ke Islaman, yang jelas-jelas berbeda dengan demokrasi liberal ala Barat. Sebab, demokrasi liberal tidak sesuai, bahkan

---

<sup>8</sup> برهان غليون و محمد سليم النظم السياسي في الإسلام دار الفكر ص ٣٠١

dalam banyak hal berlawanan, dengan kultur dan tradisi Islam. Dalam demokrasi liberal kekuasaan “*Mutlak*” berada di tangan rakyat, sedangkan dalam demokrasi Islam, setidaknya yang dicoba untuk diterapkan oleh Republik Islam Iran, kekuasaan tertinggi berada di tangan kaum ulama yang dikenal dengan konsep *Wilayat al-Faqih* dan inilah sebenarnya sistem *Theo-Demokrasi* itu sendiri.

Menurut Abul A’la al-Maududi, *Theo-Demokrasi* merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat diberikan kedaulatan terbatas dibawah naungan Tuhan (Allah SWT)<sup>9</sup>. Dalam pemerintahan ini kekuatan eksekutif yang terbentuk berdasarkan kehendak umum kaum muslimin yang dimana kaum muslimin tersebut juga berhak menumbangkannya. Sistem pemerintahan *Theo-Demokrasi* ini menganut asas bahwa semua permasalahan pemerintahan dan amasalah mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Syariah diselesaikan berdasarkan mufakat bulat dan konsensus dikalangan muslimin.

Jika melihat kembali sejarah Revolusi Islam Iran, kita akan menyaksikan bahwa Imam Khomeini sejak awal sudah menerapkan sistem demokrasi dan meyakini suara rakyat sebagai pondasi sistem pemerintahan. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, Imam Khomeini langsung menyerahkan keputusan selanjutnya kepada rakyat Iran melalui Referendum. Hasilnya menunjukkan bahwa 98,2 persen memilih Republik Islam Iran sebagai sistem pemerintahan.

Yang menariknya lagi, sistem pemerintahan Islam Iran menggunakan istilah Republik. Dengan demikian, status Republik yang diimbuhkan pada sistem

---

<sup>9</sup> Asghar Ali Engineer *Revolusi Negara Islam* Pustaka Pelajar Yogyakarta 2000 hal 205-207

pemerintahan Islam, menunjukkan basis rakyat dalam sistem ini. Keputusan Imam Khomeini sangatlah bijak dengan mengimbuahkan Republik pada sistem pemerintahan Iran. Untuk itu, inovasi Imam Khomeini tersebut disambut baik oleh masyarakat Iran yang mayoritasnya adalah muslim. Imam Khomeini juga sangat menyadari bahwa seideal apapun sebuah sistem tidak akan berjalan tanpa didukung oleh rakyat. Syarat *akseptabilitas* (makbuliat) merupakan hal yang sangat urgen dalam sistem pemerintahan Islam. Ayatollah Khomeinei menegaskan bahwa salah satu keberhasilan besar Revolusi Islam Iran adalah berhasil menyatukan demokrasi dengan agama. Dalam sistem pemerintah Islam Iran, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Pasca Revolusi Islam Iran, masyarakat agamis negara ini sepakat memilih Islam sebagai landasan sistem pemerintahan.

Persoalan yang kemudian menarik dalam sistem pemerintahan Iran ini adalah karena sistem ini mengadopsi dan menggunakan teori "*Trias Politika*" seperti yang dipraktekkan dalam negara-negara sistem demokrasi. Teori Trias Politika sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu (1689-1755) yang memisahkan kekuasaan (*separation of power*) menjadi tiga bagian; Pertama, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*application function*), Kedua, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*), dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-

undang (*rule adjudication function*)<sup>10</sup>. Meskipun demikian menurut Khomeini dalam konsep *Wilayat al-Faqih*, hanya faqih yang memegang otoritas yang tertinggi, semua kekuasaan bersumber dari kedudukannya sebagai *Mujtahid* tertinggi yang memiliki kewenangan terbesar dalam penafsiran sumber hukum.

Alasan inilah yang melatar belakangi penulis menulis Skripsi dengan Judul **“Proses Negara Republik Islam Iran dalam Mengadopsi Theo-Demokrasi”** dengan studi kasus tentang Negara Republik Islam Iran.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penulisan Skripsi ini adalah :

1. Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran politik terutama sistem politik yang ideal bagi Dunia Islam.
2. Penelitian ini diharapkan juga untuk memberikan alternatif bagi dunia Islam, untuk lebih menciptakan sistem politik yang adil dalam proses pencapaian masyarakat yang lebih baik.
3. Sebagai perwujudan teori-teori yang penulis terima dibangku kuliah, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang telah dibuat.

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 151-158.



4. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Rumusan masalah**

Sesuai dengan ulasan yang dikemukakan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

*Bagaimana Proses Negara Republik Islam Iran mengadopsi Sistem Theo-Demokrasi?*

### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut Mochtar Mas' oed Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi<sup>11</sup>. Selain dapat dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi<sup>12</sup>. Dalam buku yang lain di jelaskan Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika sehingga menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu, dan diharapkan bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah<sup>13</sup>.

Sebelum mengurai tentang kerangka pemikiran ini, ada baiknya penulis ingin membedakan pengertian antara Theokrasi, Demokrasi dan Theo-Demokrasi sebagai upaya untuk membedakan sistem politik yang pernah digunakan dalam Republik Islam Iran.

---

<sup>11</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3ES*, hal 185.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Metode*. Pusat Antar Universitas Studi Sosial, UGM, Yogyakarta, 1988, hal 161.

Dalam النظم السياسي في الإسلام menjelaskan *Theokrasi* adalah :

ثيوقراطية وهي الحكومة الدينية، أو هي الحكومة التي تغلب على حكمها النزعات الدينية، أو التي تقول بحكم الله، وتطبق الشريعة بدلاً من القانون الوضعي، أو النظام السياسي الذي يستند إلى سلطان إلهي.

والجماعات الأ صولية اليهودية والمسيحية والإسلام إنما تصدر عن نزعة ثيوقراطية. وكان أول داعية للثيوقراطية في العلم المسيحي سافونا رولا، وفي العلم الإسلامي أحمد بن حنبل، ثم ابن تيمية. وحسن البن و سيد قطب<sup>14</sup>.

Dari uraian tersebut pengertian *Theokrasi* adalah pemerintahan yang para pemimpinnya berdiri atas motivasi agama atau pemerintahan yang didalamnya menegakkan hukum-hukum Allah dan menegakkan syariat sebagai Undang-undang kenegaraan. Dan juga bisa diartikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan pada kekuasaan tuhan. Sedangkan semua Fundamental baik Yahudi, nasrani dan Islam menyerukan *Theokrasi*. Dari kalangan yahudi yang pertama kali menyerukan *Theokrasi* adalah *Sapuna Rola*, dari Islam adalah *Ahmad bin Hamabal*, *Ibnu Taymiyah*, *Hasan Al-banna* dan *Zaid Quhtb*.

Dari pengertian tersebut penulis memahami *Theokrasi* Islam berbeda dengan konsep *Theokrasi* menurut barat. Menurut Islam *Theokrasi* sebagaimana yang dijelaskan diatas tersebut. Yaitu pemerintahan agama atau pemerintahan yang hukum-hukumnya didasarkan pada agama, atau pemerintahan yang di pimpin oleh

---

برهان غليون و محمد سليم النظم السياسي في الإسلام دار الفكر ص ١٠٣<sup>14</sup>

seseorang yang punya otoritas ketuhanan dalam hal ini adalah “*Vilayat al-Faqih*”. Sedangkan menurut konsep barat penulis memahami *Theokrasi* adalah Negara atau pemerintahan yang dipimpin dengan mengatasnamakan tuhan misalnya yang terjadi di Roma pada abad pertengahan yaitu pada masa Paus Paulus.

Sedangkan dalam الاخلاق السياسة للدولة الإسلامية في القرآن والسنة Menjelaskan *Theokrasi* adalah

إن التثوقراطية إنما يقصد بها أنها حكومة الإله أو الآلهة الذين يكونون ممثلين برجال كهنوت، أو زعماء روحيين مقدسين، ومن أمثلتها : حكومة البابوات في العصور الوسطى، ولا شك أن دولة الإسلام ليست كذلك، فالإمام لا يستمد سلطته من الله... إنه ليس بمشرع، ولكنه منفذ لشرع الله، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بما يوحى إليه، فإن الخليفة يحكم بالشرعية وهو غير معصوم، وليس له ولا لغيره حق احتكار الشرعية وأحكامها<sup>15</sup>.

Dari Pengertian tersebut maka dapat diambil penjelasan *Theokrasi* adalah kekuasaan atau pemerintahan yang didasarkan atas hukum-hukum tuhan yang diwakili oleh beberapa orang laki-laki atau diwakili oleh para pemimpin rohani yang dianggap suci. Contohnya adalah kekuasaan para pendeta di abad pertengahan dan tidak diragukan lagi bahwa Negara Islam bukanlah demikian. Seorang pemimpin Islam tidak mendapat mandat kekuasaan dari Allah. Dan dia bukan seorang pembuat hukum namun hanya pelaksana Syariat Allah. Dalam hal ini Islam menolak konsep

---

محمد زكريا النراف/ الاخلاق السياسة للدولة الإسلامية في القرآن والسنة ص ٤٣٢ 15

*Theokrasi* menurut barat yang mereka yakini pemimpin adalah pemerintahan yang dipimpin dengan mengatas namakan tuhan.

Sedangkan Pengertian *Demokrasi* dalam النظم السياسي في الإسلام adalah :

الديمقراطية معناها الحرفي حكومة الشعب، وهي بمدلو لها العام تتسع لكل مذهب سياسي يقوم على حكم الشعب لنفسه، باختياره الحر لحكامه، وبخاصة القنمين منهم بالتشريع، ثم برقابته بعد اختيارهم. ولما كان إجماع الشعب مستحيلاً، وبخا صط في أمور السياسة والحكم، فإن حكومة الشعب قد أصبحت تعني عملياً حكومة الأغلبية، كنظم متميز عن نظام الحكم الفردي ونظم حكومة الأقلية<sup>16</sup>.

Dari kitab tersebut pada intinya secara harfiyah *Demokrasi* adalah pemerintahan rakyat (kekuasaan rakyat) secara umum dapat diartikan sebagai semua faham (Ideologi Politik) yang berdiri diatas kekuasaan rakyat bagi diri mereka dengan memilih (menentukan pemimpin secara bebas untuk memimpin mereka) khususnya pemimpin yang menentukan hukum untuk mereka, kemudian mereka mengawasi para pemimpin tersebut setelah memilih. Oleh karena berkumpulnya semua rakyat dalam menentukan kebijakan tidak memunkinkan, maka solusi dari hal tersebut adalah mengirim wakil mereka yang dipilih oleh Rakyat untuk duduk diparlemen dalam menentukan kebijakan.

Sedangkan *Demokrasi* pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal. Salah satunya adalah “*government of the people, by the people, and for the*

---

برهان غليون و محمد سليم النظم السياسي في الإسلام دار الفكر ص ٣٠٣<sup>16</sup>

*people*". Menurut bahasa, *Demokrasi* berasal dari bahasa Yunani yaitu dari *Demos* (Rakyat) dan *Cratos* atau *Cratein* (pemerintahan atau kekuasaan). *Demokrasi* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem *Demokrasi* rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan.

Wadah Masyarakat untuk memilih seseorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinannya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki, dan mereka berhak meminta pertanggung jawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah. Mereka pun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai<sup>17</sup>.

Dalam demokrasi terdapat pembagian kekuasaan politik, di mana pembagian kekuasaan tersebut dapat saling mengawasi dan mengontrol antara yang satu dengan yang lain berdasarkan prinsip *Checks and Balance*. Ketiga pembagian kekuasaan politik tersebut adalah Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.

Sedangkan *Theokrasi* identik dengan pemusatan kekuasaan pada tokoh-tokoh spiritual yang sekaligus sebagai Kepala Negara. Dalam Negara *Theokrasi*, Kepala Negara sebagai tokoh spiritual. Dan dalam Negara *Demokrasi* lebih mengedepankan kepada partisipasi Rakyat yang memungkinkan terbentuknya dewan perwakilan yang salah satu fungsinya adalah memilih kepala Negara.

---

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qordawy dalam <http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/05/13/menggugat-demokrasi-definisi-demokrasi/di> akses pada 06 Juli 2010

Seperti dapat diduga dari istilahnya, konsep *Theo-Demokrasi* adalah akumulasi ide *Theokrasi* dengan ide *Demokrasi*. Adapun Konsep *Theo-Demokrasi* merupakan konsep sistem politik Islam yang digagas oleh Abul A'la al-Maududi, ulama Pakistan yang mendirikan gerakan Islam Jamaat-e-Islami pada tahun 1940-an. Konsep itu dituangkan dalam bukunya yang terkenal, *Al-Khilafah wa al-Mulk* (Khilafah dan Kekuasaan), yang terbit di Kuwait tahun 1978.

Namun Al-Maududi tidak menerima secara mutlak konsep *Theokrasi* dan *Demokrasi* ala Barat. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat (inti demokrasi), berdasarkan dua alasan:

*Pertama*, karena menurutnya kedaulatan tertinggi adalah di tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang berhak menjadi pembuat hukum (*law giver*). Manusia tidak berhak membuat hukum.

Kedua, karena praktek *kedaulatan rakyat* sering justru menjadi omong-kosong. Partisipasi politik rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu, sedangkan kendali pemerintahan sehari-hari sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa yang meskipun mengatas namakan rakyat, sering malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi<sup>18</sup>.

Namun demikian, ada satu aspek *Demokrasi* yang diterima al-Maududi, yakni bahwa kekuasaan (*Khilafah*) ada di tangan setiap individu kaum Mukmin. Khilafah tidak dikhususkan bagi kelompok atau kelas tertentu. Inilah yang menurut al-Maududi membedakan sistem Khilafah dengan sistem kerajaan. Dari sinilah al-

---

<sup>18</sup> Abul A'la Al-Maududi *Al-Khilafah wa al-Mulk* (Khilafah dan Kekuasaan) Mizan Bandung Hal 20

Maududi lalu menyimpulkan, “Dan ini pulalah yang mengarahkan Khilafah Islamiyah ke arah demokrasi, meskipun terdapat perbedaan asasi antara demokrasi Islami dan demokrasi Barat”<sup>19</sup>.

Mengenai *Theokrasi*, yang juga menjadi akar konsep *Theo-Demokrasi*, sebenarnya juga ditolak oleh al-Maududi, terutama *Theokrasi* model Eropa pada Abad Pertengahan di mana penguasa (raja) mendominasi kekuasaan dan membuat hukum sendiri atas nama Tuhan. Meskipun demikian, ada analisis *Theokrasi* yang diambil al-Maududi, yakni pengertian kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah. Dengan demikian, menurut al-Maududi, rakyat mengakui kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah, dan kemudian, dengan sukarela dan atas keinginan rakyat sendiri, menjadikan kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah Swt<sup>20</sup>.

Adapun teori yang digunakan penulis dalam menganalisa sistem politik yang ada di Iran adalah *Konsep Pelembagaan Politik* sebagai kerangka analisa di dalam memahami adopsi Iran terhadap *Theo-Demokrasi* sebagai sebuah sistem politik di Iran.

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan

---

<sup>19</sup> Ibid Hal 67

<sup>20</sup> Ibid

termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analisa politik. Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus.

Proses Institusionalisme dalam Theo-Demokrasi dalam skop analisa negara di Negara Republik Islam Iran Huntington mendefinisikan dengan *The Proseses by Which organizations and procedures acquire value and stability*<sup>21</sup>. Untuk menjelaskan proses ini berdasarkan hal tersebut, hal yang perlu dilihat dalam institusionalisme politik adalah : (1) Tingkat adaptasi, (2) Tingkat kesederhanaan, (3) tingkat otonomi<sup>22</sup>.

Dewasa ini, Syi'ah dan politik seringkali diletakkan sebagai dua kata yang tidak mungkin dipisahkan. Dibanding dengan paham Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah), Syi'ah dianggap lebih politis. Dilihat dari aspek sejarahnya pun, Syi'ah memang lahir karena faktor politik, yakni menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Masalah politik (kekuasaan) dalam Islam inilah yang menjadi sumber "perpecahan" antara Sunni dan Syi'ah.

---

<sup>21</sup> Samuel E. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven Conn, Yale University Press, 1968, hal. 12 dalam Tesis Surwandono *Demokratisasi Di Dunia Islam: Studi Proses Demokratisasi di Iran dan Pakistan, 1999* UGM Hal 10 (tidak dipublikasikan)

<sup>22</sup> Ibid



Keterkaitan yang sangat erat antara Syi'ah dan politik, memang dapat dimaklumi. Sayid Muhammad Husein al-Jufri mengatakan: "Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang pada dasarnya seorang guru keagamaan, namun pada saat yang sama, karena keadaan, juga sekaligus sebagai penguasa duniawi dan negarawan." Begitu juga Syi'isme, dalam watak yang dibawanya selalu bersifat religius dan politik, dan oleh sebab itu, pada tingkat eksistensinya, sulit dibedakan mana "Syi'ah religius" dan mana "Syi'ah politik".

Sejauh menyangkut sistem politik dan model pemerintahan, Syi'ah seringkali dikritik karena dianggap tidak demokratis. Kritik semacam ini memang dapat dimaklumi, karena sebagaimana diketahui, secara historis sistem pemerintahan Syi'ah mengacu pada sistem imamah, yaitu suatu doktrin politik yang menyebutkan bahwa pemerintahan Islam sepeninggal Nabi SAW adalah hak mutlak ahlul bait (keluarga Nabi SAW.) yakni Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya. Hal ini oleh banyak pengamat dianggap tidak memberikan peluang bagi pihak lain untuk dipilih sebagai pemimpin negara.

Dilihat dari sudut pandang ini, kritik tersebut memang bisa diterima. Namun yang seringkali dilupakan adalah, bahwa dalam mazhab Syi'ah selama ini terus mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat penting. sistem imamah sebenarnya hanyalah doktrin politik yang hanya berlaku semasa para imam (keturunan Ali bin Abi Thalib) masih hidup. Setelah mereka semuanya wafat, maka mazhab Syi'ah, terutama setelah Imam Khomeini berhasil menjatuhkan kekuasaan

rejim Pahlevi pada tahun 1979, maka di kalangan Syi'ah dikenal istilah konsep Wilayah al-Faqih (kekuasaan para faqih). Dengan sistem baru ini, maka Islam Syi'ah telah mengawali babak baru sistem pemerintahan yang cukup demokratis. Oleh sebab itu, dapat dimengerti jika pemerintahan Islam di Iran menggunakan sistem Republik Islam Iran<sup>23</sup>.

Oleh karena itu, Madzhab politik Sunni mengarah kepada sistem *Demokrasi* sedangkan Madzhab Politik Syiah mengarah kepada *Theokrasi*. Jadi dalam sistem politik di Iran tidak menganut sistem Demokrasi secara langsung ala Barat akan tetapi masih mempercayakan Undang-undang maupun hukum tertinggi adalah Alqur'an yang mana dogma-dogma ketuhanan tidak bisa di tinggalkan, akan tetapi disisi lain menganut suara rakyat adalah suara tuhan (yang tidak di tetapkan dalam Al-qur'an), dalam hal ini suara rakyat otoritasnya dibawah Al-qur'an.

Yang menarik dari kasus tersebut yaitu Negara Republik Islam Iran menganut sistem *Theodemokrasi* suatu paradigma<sup>24</sup> baru dalam sistem politik, artinya di satu sisi mereka mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yaitu undang-undang dan hukum tertinggi adalah Tuhan lewat kitab suci Al-qur'an, dengan mengedepankan dogma-dogma ketuhanan dan dogma-dogma tersebut tidak bisa ditinggalkan yang merupakan sistem baru dalam dunia pemikiran politik, sedangkan di sisi lain lebih mengedepankan suara rakyat sebagai suara tertinggi dibawah kekuasaan tuhan.

---

<sup>23</sup> Artikel Dedy Syaputra "Konsep Tata Negara Wilayah Al-Faqih Dalam Sistem Politik Islam Syi'ah Imamiyah"

<sup>24</sup> Di Pinjam dari Istilah Thomas Khun dalam Scientific Revolution "Dogma Merupakan Aliran Pemikiran yang memiliki persamaan asumsi dasar tentang sesuatu.

Sehingga dalam sistem politik Negara Republik Islam Iran rakyat adalah yang berkuasa, tapi kedaulatan ada di tangan tuhan.

Sehingga sistem *Theo-demokrasi* inilah dinilai oleh penulis sebagai sebuah sistem alternatif bagi Negara-negara timur tengah khususnya Negara-negara dunia Islam, karena dalam Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mereka masih berkeyakinan dan masih berpegang teguh terhadap norma-norma keislaman, sehingga bisa di jadikan sebuah paradigma baru dalam sistem politik.

#### **E. Hipotesa**

Hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang ada dalam menjawab permasalahan ini. Dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka hipotesis yang dapat diambil yakni, Sistem *Theo-Demokrasi* di Iran merupakan dampak pemahaman keagamaan yang berkembang di negara itu. Hal itu terjadi dikarenakan adanya tawar menawar antara kelompok Syiah mayoritas dengan Sunni minoritas, hal ini terjadi karena kelompok sunni berhubungan erat dengan kelompok Pro-demokrasi yang juga merupakan tuntutan global.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang yang berawal dari minat untuk mengetahui fenomena-fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode yang sesuai dan seterusnya<sup>25</sup>. Hal yang sangat penting bagi peneliti adalah adanya minat untuk meneliti masalah sosial

---

<sup>25</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LP3ES, hal. 12.

atau fenomena sosial tertentu. Minat tersebut dapat berkembang melalui rangsangan bacaan, diskusi, seminar, atau pengamatan, atau bahkan gabungan dari hal-hal tersebut. Titik tolak yang sesungguhnya bukanlah metode penelitian, akan tetapi kepekaan dan minat, ditopang oleh akal sehat (*common sense*)<sup>26</sup>. Berbagai tahap harus ditempuh untuk tercapai hasil penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, dan masing-masing tahapan perlu dilakukan secara kritis, cermat dan sistematis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *library reseach* atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi yang akan menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah.

Sedangkan metode penulisan yang akan penulis gunakan adalah metode *deskriptif* dan *argumentative*. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok permasalahannya tidak terjadi penyimpangan. Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data maka penulis menggunakan batasan, bahwa dalam penelitian

---

<sup>26</sup> Ibid